

PERKEMBANGAN MADRASAH DI INDONESIA: KAJIAN HISTORIS PADA MADRASAH NAHDLATUL WATHAN LOMBOK

Fathurrahman^{1*}

Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Indonesia¹

Corresponding Author: Fathurrahman fathurrahman@uinmataram.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan studi tentang perkembangan institusi pendidikan madrasah yang ada di Lombok sebagai bagian dari perkembangan social pendidikan Islam di Indonesia. Kemunculan madrasah di Lombok merupakan fenomena modern yang dimulai sekitar abad ke-20 sebagai dampak dari pembaharuan Islam di Indonesia serta kebijakan diskriminatif pendidikan colonial yang tidak berpihak pada masyarakat Muslim. Meskipun bukan madrasah pertama, berdirinya Madrasah Nadhlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) dan Madrasah Nadhlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI) telah menjadi tonggak pembaharuan pendidikan Islam di pulau Lombok yang berlangsung sejak masa kolonialisme Belanda dan Jepang, masa kemerdekaan di era Orde Lama dan Orde Baru hingga masa reformasi. Perkembangan ini madrasah ini ditandai dengan kemampuan menyesuaikan diri dan berkembang dengan dukungan masyarakat sebagai basis madrasah, keberadaan para tuan guru sebagai pemimpin madrasah dan pesantren serta kemampuan melakukan inovasi dalam merespon perkembangan sosial keagamaan dalam masyarakat Lombok.

Kata Kunci: *Madrasah, Pembaharuan Islam, Politik Diskriminatif, NWDI, NBDI,*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

15 Agustus 2022

Revised

19 September 2022

Accepted

26 Oktober 2022

How to Cite : Fathur, "Perkembangan Madrasah di Indonesia: Kajian Historis Pada Madrasah Nahdlatul Wathan Lombok", Vol. 6, No. 2 (2022): 255-273.

DOI : <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/>

Journal Homepage: <https://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/>

This is an open access article under the CC BY SA license

: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

Tersebarannya Islam di bumi Nusantara, tidak lepas dari peran lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lembaga-lembaga tersebut berkontribusi mendidik, membina, mencerdaskan dan melahirkan anak bangsa yang berkarakter dan bermoral di setiap tempat dan waktu. Secara historis, pendidikan Islam di Nusantara awalnya berlangsung dari rumah ke masjid lalu pesantren, surau, meunasah, daya dan kemudian terlembaga menjadi madrasah dan sekolah hingga institute dan universitas Islam. Dari beragam lembaga pendidikan tersebut, keberadaan madrasah di Indonesia memegang tema sentral dalam pendidikan Islam sebagaimana keberadaan madrasah di era klasik. Madrasah di Indonesia menjadi simbol mulainya proses transformasi pendidikan Islam Indonesia yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Ia memegang peranan krusial dalam memelihara dan mentransmisikan ilmu-ilmu Islam ke peserta

didik sembari mengenalkan ilmu-ilmu umum (*ulum al-aqliyah*) pada setiap generasi. Jika pada masa klasik, madrasah juga merupakan lembaga terpenting bagi reproduksi ulama pemilik otoritas ilmu-ilmu agama dan memperkokoh eksistensi ulama sebagai ‘penjaga keimanan’ (*guardian of faith*) ummat dalam mengembangkan peradabannya,¹ maka madrasah di Indonesia merupakan lembaga yang mereproduksi kaum cendekiawan terpelajar yang memiliki kemampuan tidak hanya di bidang ilmu-ilmu agama namun juga ilmu umum sebagai pengejawantahan fungsi khalifah di muka bumi.

Secara bahasa, kata madrasah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *darasa*, *yadrusu*, *darsan* dan *madrasatan* yang berarti belajar. Kata madrasah merupakan bentuk kata keterangan tempat (*zharf makan*) yang secara harfiah berarti ‘tempat belajar’ atau ‘tempat memberikan pelajaran’. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata madrasah ekuivalen dengan kata sekolah. Kenyataan bahwa kata madrasah yang berasal dari bahasa Arab ini dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menyebabkan masyarakat lebih memahami madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yaitu ‘tempat untuk belajar agama’ atau ‘tempat untuk memberikan pelajaran agama dan keagamaan’.² Madrasah dalam Shorter Encyclopedia of Islam juga, diartikan sebagai *name of an institution where the Islamic science are studied*, nama dari suatu lembaga di mana ilmu-ilmu keislaman diajarkan.³

Pendidikan Islam di Indonesia sebelum dimasuki oleh ide-ide pembaharuan terpusat pada lembaga pendidikan Islam yang populer di kala itu dan bersifat *indigenous* yaitu di pesantren, rangkang, dayah, surau. Lembaga ini bila ditelusuri sejarahnya telah muncul sebelum Islam masuk ke Indonesia. Setelah Islam masuk barulah dilaksanakan proses Islamisasi terhadap lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Ciri-ciri pendidikan di lembaga tersebut adalah *pertama*, nonklasikal, *kedua*, metode yang digunakan adalah *sorogan*, *wetonan*, dan hafalan. Ketiga materi pelajaran adalah terpusat pada kitab-kitab klasik. Tinggi rendahnya ilmu seseorang diukur dari penguasaannya kepada kitab-kitab tersebut, semakin tinggi kitab yang dipelajari berarti semakin tinggi ilmu yang dimiliki. Hal ini disebabkan seorang santri tidak diizinkan mempelajari kitab selanjutnya sebelum dia dianggap menguasai kitab pengantarnya. Hal inilah yang menyebabkan tidak adanya batasan waktu masa pendidikan. Dengan demikian menurut Malik Fajar, madrasah mengandung arti tempat atau wahana anak mengenyam proses pembelajaran. Maksudnya, di madrasah itulah anak menjalani proses belajar secara terarah, terpimpin, dan terkendali. Dengan demikian, secara teknis madrasah menggambarkan proses pembelajaran secara formal yang tidak berbeda dengan sekolah. Hanya dalam lingkup sosio kultural, madrasah memiliki konotasi spesifik. Di lembaga ini anak memperoleh pembelajaran hal ihwal atau seluk beluk agama dan keagamaan. Sehingga dalam pemakaiannya, kata madrasah lebih dikenal sebagai sekolah agama.⁴

¹ Azyumardi Azra ‘Peradaban Islam’ dalam Taufik Abdullah et.al., *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Akar dan Awal* jilid 1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: 2002), hal. 344

² Imam Machali dan Ara Hidayat, *The Handbook of Education Management: Teori dan Praktek Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 161-162

³ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 98

⁴ A. Malik Fajar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 18-19

Kemunculan madrasah pada dasarnya merupakan upaya untuk merespons kondisi aktual pendidikan pada awal abad ke-20 yang dipandang hanya mengedepankan pendidikan di sekolah umum. Madrasah muncul sebagai upaya untuk mengintegrasikan sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan umum yang didirikan Belanda. Munculnya madrasah dengan perpaduan dua sistem pendidikan itu, memberikan warna baru bagi pendidikan Indonesia. Dengan munculnya madrasah, perubahan sosial di dalam masyarakatpun terjadi. Perubahan proses tersebut berlangsung dalam masyarakat sejak awal kemunculannya hingga sekarang ini. Interaksi madrasah dalam kehidupan social politik di negara ini mengakibatkan berbagai perubahan telah dialami oleh madrasah sejak awal berdirinya.

Adanya perubahan-perubahan dalam perkembangan madrasah sejak zaman klasik, hingga konteks madrasah di Indonesia termasuk perubahan definisi madrasah hingga perubahan kurikulum, manajemen kelembagaan, sistem dan metodologi pembelajaran menunjukkan relasi yang kuat dari madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dengan kehidupan sosial masyarakat sebagai upaya merespon perkembangan sosial budaya di tiap zaman.

Makalah ini mengkaji perkembangan madrasah Nahdlatul Wathan di Pancor Lombok Timur sebagai salah satu lembaga pendidikan Madrasah tertua di Nusa Tenggara Barat. Madrasah ini didirikan pada 17 Agustus 1936 untuk Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyyah Islamiyyah (NWDI) dan Madrasah Nahdlatul Batan Diniyyah Islamiyah (NBDI) pada tanggal 23 April 1943. Gerakan dua madrasah ini di NTB telah memberikan hasil dengan menyebarnya para alumbi di seluruh pelosok daerah ini yang kemudian bergerak mendirikan madrasah dan pondok pesantren di wilayah masing-masing. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat madrasah-madrasah Nahdlatul Wathan tersebar di desa seluruh Lombok.⁵

Kajian difokuskan pada bagaimana sejarah berdirinya madrasah secara umum, sejarah berdirinya madrasah Nahdlatul Wathan dan perkembangannya dari masa ke masa serta faktor sosial pendukung yang menyertai perkembangan madrasah ini hingga masa kini. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah *library research* dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku-buku tentang madrasah serta tulisan di jurnal online terpercaya. Data-data ini dikumpulkan, dipelajari dan dianalisa untuk mendapatkan jawaban dari tujuan penulisan.

PEMBAHASAN

Perkembangan Madrasah Di Indonesia

Madrasah sebagai salah satu bentuk kelembagaan pendidikan Islam memiliki sejarah panjang. Sebagaimana diketahui, sejarah awal pendidikan Islam di mulai dari lembaga keluarga, *kuttab* dan masjid. Pasca hijrahnya Nabi, masjid kemudian menjadi sentra utama pendidikan Islam tempat umat belajar agama dan ilmu keagamaan. Dalam perkembangannya, ramainya aktivitas pembelajaran di masjid dianggap mengganggu

⁵ Fahrurrozi, "Islam Nusantara: Menemukan Peran Organisasi Nahdlatul Wathan Terhadap Pembangunan Sosial Keagamaan di Indonesia". *Makalah Annual Conprence On Islamic Studies*, hal. 8

ketenangan masjid sebagai tempat ibadah. Sehingga pendidikan pun bertransformasi dari masjid ke madrasah.

Terdapat beberapa teori tentang transformasi masjid ke madrasah. Menurut George Maqdisi, perpindahan lembaga pendidikan dari masjid ke madrasah terjadi secara tidak langsung tetapi melalui tahapan perantara yaitu masjid *khan*.⁶ Pendapat berbeda dikemukakan oleh Ahmad Syalabi, menurutnya perkembangan dari masjid ke madrasah terjadi secara langsung, tidak memakai lembaga perantara. Perkembangan madrasah dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis dari semakin ramainya kegiatan pengajian di masjid yang fungsi utamanya adalah tempat ibadah. Untuk tidak mengganggu ketentraman dalam beribadah di masjid, maka kegiatan pendidikan dibuatkan tempat khusus yang dikenal dengan madrasah. Ahmad Syalabi menggambarkan hal ini sebagai berikut:

“Sejak masa awal Islam, banyak orang berminat untuk mempelajari Islam. Bertambah tahun, semakin banyak orang yang menghadiri pertemuan untuk belajar ilmu (*halaqah ilm*). Dari setiap *halaqah* terdengar suara dari seorang guru yang memberikan pelajarannya dan dari suara-suara peserta didik yang bertanya dan saling berdebat. Maka terjadilah suara keras dari beberapa grup pertemuan itu. Sedikit banyak hal itu menimbulkan gemuruh yang mengganggu pelaksanaan ibadah sebagaimana mestinya. Jelaslah masjid menjadi sulit untuk dijadikan tempat ibadah dan tempat belajar agama sekaligus”.⁷

Madrasah dalam sejarah pendidikan Islam semakin dikenal setelah adanya Madrasah Nizamiyah yang pengaruhnya melampaui pengaruh madrasah-madrasah yang telah didirikan sebelumnya. Sehingga pendirian madrasah Nizamiyah pada abad ke-5 dianggap sebagai tonggak pembatas untuk membedakan pendidikan Islam era sebelumnya. Madrasah dianggap tonggak era baru dalam penyelenggaraan pendidikan Islam dengan adanya ketentuan-ketentuan yang lebih jelas yang berkaitan dengan komponen-komponen pendidikan dan keterlibatan pemerintah dalam mengelola pendidik pengelolaan madrasah. Sejak masa itu, madrasah menjadi sistem pendidikan formal dan berjalan sesuai aturan yang berlaku sebagai wadah institusi pengetahuan Islam yang tersebar merata di berbagai negeri.⁸ Dalam pandangan Stanton, madrasah inilah (dalam bentuk klasiknya) dapat disebut sebagai akademi atau perguruan tinggi (*college*) sebagaimana yang kita kenal sekarang.⁹

Terlepas dari kenyataan historis munculnya institusi madrasah dalam sejarah pendidikan Islam era klasik, kehadiran madrasah dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia tergolong fenomena modern yang dimulai sekitar awal abad ke 20. Menurut

⁶ Maksun, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 58. lih. Azyumardi Azra ‘Peradaban Islam’ dalam Taufik Abdullah, et.al., *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Akar dan Awal* jilid 1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: 2002), hal. 343

⁷ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan*, hal. 55

⁸ Hasan Abd al-Al, *al-Tarbiyah al-Islamiyah fi al-Qarni al-Rabi*, (Cairo: Dar al-Fikri al-Arabi, 1978), hal. 213. Dalam hal ukuran, kurikulum dan pengajaran, madrasah memiliki kesamaan dengan sistem pengajaran masjid atau masjid *khan*. Perbedaannya terletak pada kemandirian madrasah dari kontrol langsung otoritas keagamaan dan penyediaan beasiswa untuk mahasiswa. Hal ini merupakan dua hal yang tidak ditemui pada sistem pendidikan masjid di abad-abad sebelumnya.. lih. Stanton, *Pendidikan Tinggi*, hal. 48

⁹ Charles Michael Stanton, *Pendidikan Tinggi*, hal. 45

Maksum, kemunculan madrasah sebagai respon terhadap ide pembaharuan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh dua situasi yang terjadi pada saat itu. Yaitu adanya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia dan adanya respon pendidikan Islam terhadap kebijaksanaan pendidikan Hindia Belanda.¹⁰ yang melakukan kebijakan pendidikan diskriminatif terhadap pendidikan masyarakat pribumi. Diskriminasi ini muncul karena kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslimin terpelajar jika pendidikan Islam dibiarkan berkembang, sehingga pendidikan Islam ditekan dengan berbagai aturan seperti penerbitan Ordonansi Guru dan Ordonansi Sekolah Liar yang mewajibkan guru dan penyelenggara pendidikan memiliki izin dari pemerintah Hindia Belanda.

Di satu sisi pemerintah Belanda membuka sekolah-sekolah umum Sehingga kemudian Belanda memilih bentuk sekolah yang sudah ada sebagai model pendidikan bagi masyarakat pribumi.¹¹ kebijakan ini tentu meresahkan umat Islam karena menyerupai sekolah-sekolah zending yang berkembang di wilayah Minahasa dan Maluku yang mengancam kehidupan beragama umat Islam. Perkembangan ini merangsang umat Islam meresponnya sebagai bentuk tanggungjawab agama dan social untuk menanggulangi menjauhnya umat Islam dari agamanya akibat sistem pendidikan Hindia Belanda sekaligus meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam menghadapi perubahan social. Untuk itu pendidikan Islam harus menawarkan menawarkan pola pendidikan yang lebih maju baik dalam hal kelembagaan struktur materi atau metodologinya sehingga dapat mengimbangi sekolah ala Belanda dan mendekatkan kembali umat pada agamanya.¹²

Dengan masuknya ide-ide baru dalam bidang pendidikan, maka beberapa ciri dari lembaga pendidikan Islam tradisional sebelum masuknya ide-ide pembaharuan tersebut disesuaikan dengan ide pembaruan. sistem non klasikal berubah menjadi klasikal dilengkapi dengan manajemen pendidikan yang sudah barang tentu pada tahap awal masih sederhana. Metode mengajar guru tidak lagi semata-mata berpedoman kepada metode *sorogan* dan hafalan tetapi telah bervariasi sesuai dengan tuntutan sistem klasikal. Materi pelajaran tidak lagi semata-mata berpegang kepada materi pelajaran agama dengan titik tumpu pada kitab klasik. Masuknya mata pelajaran non keagamaan adalah merupakan salah satu indikasi penting tentang masuknya ide pembaharuan di dunia pendidikan Islam Indonesia. ¹³

Gelombang perubahan ini mencapai puncaknya pada awal abad 20 dengan lahirnya institusi pendidikan Islam yang berbeda, baik dengan pondok pesantren maupun dengan sekolah umum Hindia Belanda. Embrio pendidikan Islam yang baru itu bernama madrasah sebagai respon menyahuti ide pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Kemunculan madrasah menandai abad kebangkitan dan pencerahan (*renaissance*) dalam pendidikan Islam.¹⁴ Madrasah dianggap sebagai langkah strategis yang harus ditempuh untuk memperbaharui pendidikan Islam di Indonesia. Madrasah

¹⁰ Maksum, *Madrasah Sejarah dan*, h. 82. Lih. Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 43-45

¹¹ Karel Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 2

¹² Maksum, *Madrasah Sejarah dan*, hal. 96

¹³ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan*, hal. 52

¹⁴ Murodi.. "Perkembangan Institusi Pendidikan Islam di Hindia Belanda" dalam *Jurnal Madrasah* No. 03 PPIM, Jakarta, 1997..h. 19

berada pada posisi di antara sekolah agama yang tradisional dengan sekolah Belanda yang sekuler. Madrasah mengajarkan pelajaran-pelajaran umum (seperti aritmatika, sejarah, sastra, geografi dan sebagainya) dan penerapan metode organisasi yang modern (seperti jam pelajaran yang regular, ujian, pemberian nilai, ijazah), pengajarnya adalah para guru 'orang biasa' (bukan ulama), dan bahkan memberikan pendidikan kepada kaum perempuan. Dengan begitu, madrasah dijalankan selaras dengan proyek modernisasi, namun pada saat bersamaan masih berakar pada cara pandang Islam.¹⁵

Madrasah Nahdlatul Wathan Di Lombok

Madrasah pertama di Lombok adalah Madrasah al-Ittihadul Islamiyah di Kampung Melayu Ampenan. Madrasah ini didirikan pada tahun 1930 oleh Saleh Harharah sehingga sekolah ini sering sekolah Arab. Selanjutnya berdiri madrasah Nahdlatul Wathan yang dalam perkembangannya memiliki andil yang sangat penting dalam pengembangan pendidikan Islam di Nusa Tenggara Barat.

Sebelum berdirinya Nahdlatul Wathan, di Nusa Tenggara Barat pada masa penjajahan Belanda tahun 1898, didirikan Volkshool yang pertama, yaitu di Pajang Mataram yang kemudian disusul di daerah-daerah lain yaitu Pringgabaya, Masbagik, Selong, Sumbawa besar dan Bima. Guru-gurunya di datangkan dari Jawa, Bali, Sulawesi dan Ambon yang setiap sekolah hanya memiliki satu guru. Murid-muridnya kebanyakan dari golongan bangsawan dan para pemimpin adat atau suku, sedangkan rakyat jelata sangat dibatasi. Tujuan dari pendidikan ini tidak lepas dari kepentingan penjajah saat itu, yaitu membantu melaksanakan program kaum penjajah.¹⁶ Sehingga tidak membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat Lombok.

Pada masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok, pendidikan keagamaan yang bersifat tradisional sangat populer bagi masyarakat. Pendidikan ini dianggap sebagai tujuan akhir dari kehidupan di muka bumi. Itulah sebabnya, tokoh masyarakat dan pemimpin daerah di daerah ini mengenal dan mengetahui akan bacaan dan tulisan Arab sekaligus dengan pengertian dan maknanya. Pendidikan keagamaan ini hampir dapat ditemukan di setiap tempat yang diselenggarakan di rumah yang diasuh oleh tuan guru, guru ngaji dan guru lebe. Metode yang digunakan oleh pengasuhnya sejak awal sampai tamat, hanyalah metode menghafal dan menirukan apa yang dikemukakan oleh pengasuhnya.¹⁷

Pendidikan keagamaan sempat meredup pada awal abad ke-18 ketika raja-raja di Lombok jatuh ke tangan kekuasaan Hindu yang meredupkan syi'ar Islam dan berpengaruh terhadap pendidikan Islam. Pembelajaran agama diperoleh melalui kemampuan membaca huruf jejawan yang terkandung dalam lontar-lontar Islam seperti cerita Amir Hamzah (bahasa Sasak: Amir Amsiyah), Jatiswar, Alim Sujiwa, babad Sangupati, Puspakerma, Tapel Adam, Layang Ambiya', Nabi Yusuf, Nur Muhammad, Nabi Haparas dan lainnya. Barulah menjelang akhir abad ke-19 situasi kehidupan

¹⁵ Miftahuddin, *Sejarah Perkembangan Intelektual Islam di Indonesia: Dari Abad XIX Sampai Masa Kontemporer*, (Yogyakarta: UNY Press, 2017), hal. 64-65

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Pendidikan Daerah Nusa Tenggara Barat*, (Jakarta: Depdikbud, 1984), hal. 9

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Pendidikan.....*hal. 11

beragama kembali mulai cerah dengan tumbuhnya pusat pengajian seperti di Sakra oleh Haji Ali, di Praya oleh Guru Bangkol, di Sesela oleh Haji Amin, di Sekarbela oleh TGH Mustafa dan Tanjung Lombok Timur. Di Pusat kerajaan Mataram Hindu, keadaan ini juga tidak lepas dari pengaruh isteri raja Mataram yang beragama Islam, sehingga kehidupan beragama mendapat perhatian dari raja Mataram Hindu.¹⁸

Pada akhir abad ke-19 (1897) pengajian anak-anak berkembang menjadi pondok yang dipelopori oleh TGH Ahmad Kediri. Pondokan ini didirikan disekitar pekarangan tuan guru. Ilmu yang diajarkanpun semakin luas seperti menulis huruf Arab, ilmu ushul, fiqh, nahu sharaf, bahasa arab dan sebagainya. Pelajaran yang diberikan secara klasikal, tetapi dengan duduk di tikar menghadap guru. Anak-anak pun sudah diatur atas kelas-kelas. Pola ini kemudian dikembangkan di beberapa desa di pulau Lombok.¹⁹

Madrasah Nahdlatul Wathan pada awalnya dimulai dari mushalla al-Mujahidin yang didirikan oleh orang tua TGKH Zainuddin Abdul Majid sepulangnya dari Makkah. Sistem pendidikan yang digunakan pada awalnya adalah sistem tradisional yakni dalam bentuk pengajian kitab dengan sistem halaqah. Meskipun sebagai orang Sasak pertama yang menamatkan belajar dengan sistem pendidikan madrasah, TGKH Zainuddin Abdul Majid tidak langsung mendirikan madrasah karena pada saat itu belum dikenal istilah madrasah. Setelah sistem halaqah yang dijalankan selama dua (2) tahun tidak menghasilkan perubahan berarti bagi kemajuan proses belajar agama Islam, diadakan pembaharuan sistem belajar dengan menggunakan semi klasikal, yaitu penggabungan antara sistem klasikal dengan sistem halaqah. Artinya pelajaran diberikan dengan memakai alat tulis seperti papan tulis, namun para murid masih duduk secara bersila seperti sistem halaqah dan pengajian umum tanpa kitab. Adapun kurikulum yang digunakan masih terbatas pada pelajaran qiroat al-qur'an, hifzussuar, hija tajwid, menulis huruf Arab dan Latin, imla', tauhid dan fiqh.

Sistem ini adalah untuk yang pertama kalinya diadakan di Lombok dalam memberikan pelajaran agama Islam.²⁰ Perubahan ini mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat karena hasil belajarnya yang jauh lebih berhasil dibandingkan dengan halaqah. Hal ini dibuktikan dengan melonjaknya jumlah santri pada awal berdirinya. Melihat hasil dan respon positif masyarakat terhadap hasil pengajaran yang dikembangkan tersebut, mulai diperkenalkan sistem baru yaitu sistem pendidikan madrasah dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah kolonial Belanda dengan keluarnya Akte Notaris tanggal 17 Agustus 1936 perubahan pondok pesantren al-Mujahidin menjadi madrasah dengan nama Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah. Gedung madrasahnyadiresmikan pemakaiannya pada tanggal 22 Agustus 1937 atau 15 Jumadil akhir 1356 H.²¹ Kebijakan pemerintah Belanda memang mengizinkan adanya pendidikan agama pada sekolah-sekolah desa apabila dikehendaki masyarakat, namun

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Pendidikan*.....hal. 23

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Pendidikan*.....hal. 41

²⁰ Syamsuddin, "Peranan Nahdlatul Wathan Dalam Pengembangan Dakwah Islam di Lombok Melalui Pendekatan Pendidikan" *Skripsi*, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1982, hal. 42

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Pendidikan*..... hal. 42

hal tersebut tidak pernah dilakukan²². Sehingga pada masa tersebut pendidikan agama diselenggarakan oleh masyarakat

Meskipun demikian, pendirian madrasah dengan sistem klasikal ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan mendapat tantangan keras dari tokoh masyarakat. Sistem ini oleh masyarakat dianggap sebagai sistem yang dianut dan dipakai oleh aliran Khawarij, Mu'tazilah, Wahabi dan ajaran yang menyesatkan yang dilakukan oleh orang bukan Islam.²³ Penentangan dari masyarakat ini menyebabkan banyaknya murid yang keluar hingga tersisa pada saat itu kurang lebih 50 orang. Bahkan masyarakat yang telah mewakafkan tanahnya untuk pembangunan madrasah ini mencabutnya kembali karena madrasah NWDI dianggap mengajarkan kesesatan.

Imbas dari pendirian madrasah ini pun berdampak pada posisi TGKH Zainuddin Abdul Majid sebagai khatib masjid besar yang merupakan jabatan sangat tinggi dalam struktur keagamaan masyarakat pada masa itu. Pilihan antara tetap melanjutkan sistem madrasah dan diberhentikan dari jabatan khatib masjid besar diambil oleh TGKH Zainuddin Abdul Majid dengan pertimbangan bahwa yang utama adalah mendidik dan melepas masyarakat dari kejahilan (kebodohan) terutama di bidang agama serta membentuk unsur-unsur manusia yang nantinya akan mampu memakmurkan masjid.²⁴

Motivasi utama pendirian madrasah ini adalah cukup kuatnya hasrat memperdalam ilmu pengetahuan islam dan ilmu pengetahuan umum untuk meningkatkan kualitas umat Islam dan membebaskan mereka dari kungkungan keterbelakangan dan kebodohan. Sistem pendidikan halaqah dan pengajian tradisional seperti yang berlaku pada umumnya dianggap kurang mampu mempertinggi mutu pendidikan agama. Di samping itu, sistem pendidikan semi klasikal yang telah dikembangkan di al-Mujahidin dianggap telah memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil pendidikan Islam. Karena itu, dipandang telah waktunya menggunakan sistem pendidikan klasikal dengan mendirikan madrasah.²⁵ Nampaknya, sistem pendidikan semi klasikal dan pengajian umum tanpa kitab yang diterapkan sebelumnya adalah merupakan tujuan instrumental menuju sistem klasikal. Dalam sistem klasikal ini, madrasah NWDI terdiri dari tiga tingkat, yaitu:

- a. Tingkat *ilzamiyah* (persiapan) satu tahun bagi anak-anak yang masih buta huruf Qur'an dan huruf latin. Tingkat ini disebut juga tingkat nol
- b. Tingkat *tahdiriyah*, dengan lama belajar tiga tahun bagi anak-anak yang sudah membaca dan diberikan pelajaran asas seperti tauhid, fiqih, dan pengetahuan dasar tentang kaedah bahasa Arab
- c. Tingkat *ibtida'iyah* dengan lama belajar empat tahun bagi para pelajar/santri yang sudah boleh membaca kitab yang tidak berbaris. Pada tingkat ini, selain nahwu sharaf (Syarh Dahlan, Mutammimah dan sebagainya), juga diberikan Balaghah

²² Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 47

²³ Hamzanwadi *80 Tahun dan Pengabdiannya Terhadap Agama Nusa dan Bangsa*, (Pancor: Yayasan Pendidikan Hamzanwadi, 1985), hal. 9

²⁴ M. Yusuf, *Sejarah Ringkas Perguruan Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah dan Nadhlatul Banat Diniyah Islamiyah NW*, (Pancor Selong, ttp, 1976), hal.24.

²⁵ Abdul Hayyi Nu'man & Shafari Asy'ari, *Nahdlatul Wathan: Organisasi Pendidikan, Sosial dan Dakwah Islamiyah*, (Lombok Timur: Pengurus Daerah Nahdlatul Wathan Lombok timur, tt), hal. 94

Ma'ani, Badi, Bayan Mantiq, ushul Fiqh dan berbagai kitab lainnya termasuk kitab-kitab dari *mazahibul arba'ah* dan tasawwuf bagi kelas empat ibtidaiyah yang semua kurikulum agamanya mengikuti madrasah Shaulatiyah Makkah sebagai madrasah sumber/induk.²⁶

Setelah madrasah NWDI menghasilkan lulusan angkatan pertama tahun 1941, TGKH Zainuddin Abdul Majid berusaha mengembangkan madrasah tersebut dengan mendirikan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI) pada tanggal 21 April 1943 (15 Rabiul Akhir 1362 H), dan menamatkan pelajaran pertamanya pada tahun 1949. Seperti halnya madrasah NWDI, maka berdirinya NBDI juga mendapat reaksi keras dari masyarakat. Dalam pandangan masyarakat pada waktu itu, wanita tidak perlu diajar menulis atau sekolah, karena akan menyebabkan wanita berani tampil di depan khalayak kaum laki-laki dan akan bertingkah laku kurang sopan. Inilah madrasah pertama di Nusa Tenggara yang mencetuskan pendidikan untuk kaum perempuan yang sebelumnya tidak pernah dirintis oleh tuan guru lain di Nusa Tenggara.²⁷

Namun seiring perkembangan waktu, visi pembaharuan madrasah yang dilakukan TGKH Zainuddin Abdul Majid kemudian mendapat simpati luas dari masyarakat setelah dampak positif yang dihasilkan para lulusannya di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan pada masa penjajahan Belanda, sistem madrasah merupakan satu-satunya sarana bagi pemuda desa untuk memperoleh pengetahuan umum sebagai bekal menjadi tenaga administrasi di pulau Lombok. Pendidikan umum yang ada pada saat itu hanya terdapat di kota Mataram. Dan itupun terbatas pada golongan masyarakat Eropa, bangsawan pribumi dan anak-anak swapraja.

1. Madrasah Nahdlatul Wathan Pada Masa Penjajahan.

Pendidikan pada masa kolonial Belanda sangat berbeda dengan pendidikan Islam tradisional, bukan saja dari segi metodenya, tetapi lebih khusus lagi dari segi isi dan tujuannya. Pendidikan yang dikelola colonial berpusat pada pengetahuan dan keterampilan duniawi, yaitu pendidikan umum, sedangkan pendidikan Islam tradisional lebih ditekankan pada pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi penghayatan agama.²⁸ Sekolah Belanda pada masa kala itu dibagi atas tiga strata. Strata *pertama* adalah strata sekolah-sekolah untuk anak-anak Belanda. Strata *kedua* adalah sekolah untuk anak-anak kelompok elit pribumi yang memiliki kemampuan ekonomi dan mempunyai posisi di pemerintahan dan *ketiga* sekolah untuk anak-anak bumiputera yang hanya boleh mengecap pendidikan Sekolah Desa (3 tahun) atau sekolah Kelas Dua (5 tahun).²⁹ Di lembaga sekolah seperti ini berlaku ordonansi Indische Straatsregeling pasal 179 ayat 2 yang menyatakan “pengajaran umum adalah netral, artinya bahwa pengajaran itu diberikan dengan menghormati

²⁶ Jamaluddin Abdul Aziz, “Hamzanwadi dan NW” *Disertasi*, Universitas Kebangsaan Malaysia, Program Diploma F.P.I UKM, 1989), hal. 118-120

²⁷ Fahrurrozi, “Islam Nusantara: Menemukanali”, hal. 22

²⁸ Karel a. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 24

²⁹ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan*, h. 45

keyakinan agama masing-masing. Pengajaran agama hanya boleh berlaku di luar jam sekolah”.³⁰

Hal ini mengakibatkan para ulama menganggap sekolah seperti ini sebagai lembaga yang sengaja diadakan oleh Belanda untuk menghancurkan agama Islam. Apalagi dalam praktek, anak-anak laki dan wanita dididik bersama-sama dalam suatu ruang kelas, dengan pakaian yang menurut anggapan para ulama sangat bertentangan dengan agama. Anak-anak yang sudah bersekolah, menurut penilaian para ulama kurang mengindahkan syariat agama, dan terlalu condong terhadap urusan duniawi. Apalagi setelah pemerintah semakin mendekati golongan adat yang fanatik terhadap sistem feodalisme, kepercayaan para ulama terhadap Belanda semakin berkurang. Dalam perkembangan selanjutnya, dengan sekolah seperti ini, penjajah Belanda berhasil menjauhkan sebagian umat Islam yang terpicat oleh sistem pendidikan Barat yang nampak maju dan dapat menjamin kehidupan duniawi. Umat Islam sedikit demi sedikit mulai dicabut kepercayaan agamanya sampai ke akar-akarnya.³¹

Untuk menjauhkan masyarakat Lombok dari westernisasi dan menjaga akidah anak-anak sembari mengajarkan pengetahuan umum, keberadaan madrasah Nahdlatul Wathan memiliki peranan yang signifikan bagi dan dalam proses perkembangan masyarakat Sasak untuk memperoleh pengetahuan umum seperti yang ada pada sekolah-sekolah Belanda tersebut. Lembaga seperti inilah yang mampu melakukan pemberdayaan pendidikan pada masyarakat jelata yang tidak pernah mengenal pengetahuan lain selain agama dan tradisi lokal. Peluang inilah yang dilihat oleh TGKH Zainuddin Abdul Majid untuk memberdayakan pendidikan di Lombok. Hal ini dimungkinkan karena kebijakan pemerintah Belanda memang mengizinkan adanya sekolah-sekolah agama yang dikelola masyarakat selama tidak bertentangan dengan Ordonansi Guru dan Ordonansi Sekolah Liar.³²

Meskipun demikian, pada masa penjajahan Belanda, keberadaan madrasah NWDI dan NBDI tidak terlalu mendapat tekanan yang keras dari pemerintah jajahan, hal ini sebabkan strategi TGKH Zainuddin Abdul Majid yang berorientasi pada pendidikan agama dengan pengetahuan umum dasar dan menghindari konfrontasi langsung dengan pemerintah jajahan, sehingga oleh pemerintah Belanda dianggap tidak membahayakan.

Berbeda dengan kebanyakan pesantren yang cenderung defensif terhadap kebijakan Belanda dengan menjauh secara geografis dari pusat pemerintahan Belanda dengan cara membangun pesantren pada daerah-daerah terpencil yang jauh dari kekuasaan Belanda, NWDI dan NBDI justru mengembangkan visi pembaharuannya dengan kebijakan membangun lembaga pendidikannya di kawasan pusat pemerintahan Belanda di Lombok Timur (Selong) dan mengambil sikap ofensif (terbuka) terhadap Belanda dengan tujuan upaya mengembangkan

³⁰ Manpan Drajat, 'Sejarah Madrasah di Indonesia' dalam *jurnal al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 1 No. 1 Januari 2018, hal. ,

³¹ Zuhairini, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 223

³² Maksum, *Madrasah: Sejarah dan*, hal. 114

pembaharuan pendidikan madrasah nya sebagai perjuangan jangka panjang dapat memberi hasil nyata pada masyarakat Sasak Lombok.³³

Pada masa penjajahan Jepang, meskipun mendapat pengawasan ketat dari pemerintah dan kaki tangan Jepang, madrasah NWDI dan NBDI mampu bertahan menjalankan aktivitas pengajaran dari kebijakan pemerintah Jepang yang banyak menutup dan membubarkan sekolah-sekolah Islam karena kuatir membahayakan pendudukan Jepang. Alasan yang digunakan oleh TGKH Zainuddin Abdul Majid saat itu adalah bahwa bidang studi yang diajarkan di NWDI dan NBDI adalah studi tentang bahasa Arab, dimana bahasa Arab merupakan bahasa Agama bagi umat Islam dan ibadah ritualnya dan tidaklah syah dan sempurna ibadah umat Islam jika menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Dengan alasan tersebut, maka terbitlah Surat Keputusan Pemerintah Jepang di Singaraja Bali yang intinya membiarkan NWDI dan NBDI menyelenggarakan kegiatan pendidikannya.³⁴

Eksistensi madrasah yang mampu bertahan pada dua masa penjajahan ini disebabkan setidaknya pada dua hal, yaitu *pertama*, visi pembaharuan yang dimiliki TGKH. Zainuddin Abdul Majid melihat arah perkembangan zaman yang harus direspon oleh pesantren dengan pola akulturasi pendidikan umum dalam lembaga pendidikan agama melalui sistem madrasah. Sehingga tetap dapat menjaga akidah umat Islam sekaligus menguasai pengetahuan umum untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini menarik perhatian dan minat masyarakat untuk memasuki dunia madrasah. *Kedua*, kemampuan diplomasi yang dimiliki oleh TGKH Zainuddin Abdul Majid. Dengan tetap menempatkan madrasah NWDI di dekat pusat pemerintahan kolonial, madrasah ini akan dapat mengetahui perkembangan-perkembangan terbaru karena berada dekat dengan pusat informasi namun resistensinya tinggi karena berhadapan langsung dengan penjajah. Dengan kemampuan diplomasi dan pendekatan yang digunakan TGKH. Zainuddin Abdul Majid, pemerintahan jajahan tidak melihat ancaman langsung terhadap mereka pada saat itu. Pada masa Perang kemerdekaan, madrasah ini menjadi basis gerakan perlawanan rakyat terhadap NICA di Lombok Timur dengan membentuk suatu gerakan perlawanan yang diberi nama 'gerakan al-Mujahidin' yang mengakibatkan adanya penutupan terhadap aktivitas pendidikan di madrasah oleh NICA

2. Madrasah Nahdlatul Wathan Pada Masa Orde Lama

Setelah perang kemerdekaan usai, madrasah NWDI mengembangkan diri ke pelosok daerah-daerah di pulau Lombok. Pada tahun 1949, madrasah NW telah mempunyai cabang sebanyak 24 madrasah, terdiri dari 19 buah madrasah disediakan bagi kaum pria dan 5 buah madrasah lainnya disediakan bagi kaum wanita. Dan pada tahun 1952 telah mencapai 66 buah madrasah, di tahun 1957 telah mencapai 95 madrasah yang tersebar di pulau Lombok. Di madrasah induk sendiri dibuka madrasah tingkat lanjutan yaitu Muallimin dan Muallimat serta Sekolah Menengah

³³ Fathurrahman, "Perkembangan Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan Pancor Lombok 1937-2002" *Tesis* pada Program Pascasarjana IAIN Yogyakarta tahun 2002, hal. 70

³⁴ M. Yusuf, *Sejarah*, 28

Islam (SMI) dan PGAP (Pendidikan Guru Agama Pertama) yang ditujukan untuk menampung lulusan madrasah Ibtidaiyah 6 tahun dan Sekolah Rakyat Negeri 6 tahun. Pada madrasah Muallimin dan muallimat adalah 70% pelajaran agama dan 30% pelajaran umum. Sedangkan pada SMI menggunakan kurikulum dengan perbandingan 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. Adapun pada kurikulum Pendidikan Guru Agama Pertama (PGAP) mengacu pada kurikulum yang digunakan di PGA Negeri.

Sampai dengan tahun 1953, sistem pendidikan di madrasah Nahdlatul Wathan masih mengikuti model kurikulum Shaulatiah ditambah dengan beberapa kurikulum pendidikan umum. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat, mulai diadopsi kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan pemerintah.³⁵ Termasuk dengan mendirikan Perguruan Tinggi Keguruan yang diberi nama Akademi Paedagogik pada tahun 1964 yang merupakan perguruan tinggi kedua setelah Universitas Mataram. Adapun Perguruan Tinggi Ma'had Darul Qur'an wal Hadits al-Majidiyah asy-Syafi'iyah dibangun pada tahun 1965

3. Madrasah Nahdlatul Wathan Pada Masa Orde Baru

Langkah awal upaya pengembangan pendidikan yang dilakukan pemerintah orde Baru terhadap pendidikan Islam adalah melakukan formalisasi dan strukturisasi madrasah dengan menegerikan sejumlah madrasah. Pada tahap berikutnya, terutama tahun 70-an dan 80-an, mulai dilakukan upaya mengintergrasikan sistem pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama Tiga Menteri pada tahun 1975. Dengan SKB ini, lulusan lembaga pendidikan Islam mulai mendapat pengakuan untuk memasuki lembaga-lembaga pendidikan umum serta peluang para santri untuk masuk ke dalam komunitas modern dan akses terhadap birokrasi yang pada masa lampau didominasi oleh kalangan priyayi, semakin terbuka lebar.³⁶ Memasuki decade 1990-an, kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai madrasah telah menempatkannya sebagai satu sistem yang utuh dalam sistem pendidikan nasional melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989.³⁷

Dengan adanya SKB Tiga Menteri tahun 1975 ini, mulailah madrasah memasuki era baru yakni era kesetaraan dan kesederajatan antara madrasah dengan sekolah. Sebagaimana tujuan dari SKB ini yaitu meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah. Sebelum lahirnya SKB ini terdapat perbedaan mendasar antara lulusan madrasah dan lulusan sekolah umum. Hal ini terlihat dari dua hal. *Pertama*, dalam hal kesempatan melanjutkan studi. Lulusan madrasah sebelumnya hanya bisa melanjutkan pendidikan ke IAIN atau perguruan tinggi agama swasta. Setelah berlakunya SKB ini lulusan madrasah memperoleh kesempatan untuk melanjutkan studi ke kampus-kampus umum. *Kedua*, dari segi kesempatan kerja. Sebelum SKB

³⁵ Fathurrahman, "Perkembangan Lembaga Pendidikanhal.

³⁶ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, Sebuah Kajian Politik Tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru, (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 123

³⁷ Maksum, *Madrasah: Sejarah dan*, hal. 131-132

ini, lulusan madrasah hanya terbatas menjadi pegawai di lingkungan kementerian agama atau lembaga-lembaga keagamaan. Dengan lahirnya SKB ijazah lulusan madrasah dapat digunakan untuk bekerja di tempat-tempat lainnya.³⁸

Dengan SKB Tiga Menteri ini madrasah tidak lagi hanya dipandang sebelah mata, tetapi sudah merupakan lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Sekalipun prosentase mata pelajaran agama Islam sesuai SKB adalah sekurang-kurangnya 30%

Dengan demikian, ketegangan dalam sistem pendidikan nasional antara pendidikan umum dan pendidikan Islam yang terjadi sejak awal kemerdekaan hingga tahun 1970an akibat dikeluarkannya Kepres n0. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 15 tahun 1974 akhirnya teratasi dengan lahirnya SKB Tiga Menteri sebagai momen strategis (*strategic moment*) bagi eksistensi dan perkembangan madrasah pada masa berikutnya. Madrasah tidak saja tetap eksis dan dikelola di bawah Departemen Agama, tetapi sekaligus diposisikan secara mantap dan tegas seperti halnya sekolah dalam Sistem Pendidikan Nasional.³⁹

Orientasi development dan pemantapan stabilitas nasional dengan merangkul umat Islam oleh pemerintah dan peralihan dari Islam ideologis ke Islam kultural dan ketertarikan tokoh-tokoh Islam dengan orientasi pembangunan ekonomi Orde Baru menyebabkan terjadinya saling pengertian (*mutual understanding*) yang bermuara pada timbulnya konvergensi antara negara dan masyarakat Islam.⁴⁰ Konvergensi dalam arti terjadinya suatu bentuk pengertian dalam semangat kesediaan untuk memberi dan menerima, yang berakar pada kemantapan masing-masing kelompok kepada dirinya sendiri yang timbul dari hilangnya berbagai kekuatan antarkelompok.⁴¹

Meskipun demikian, sebagaimana diterangkan oleh Maksum, kebijaksanaan pemerintah Orde Baru terhadap pendidikan Islam tidak lepas dari kepentingan politik orde Baru terhadap umat Islam. Di mana tingkat apresiasi pemerintah terhadap pendidikan Islam merupakan cerminan tingkat dan pola hubungan negara dan Islam. Dalam situasi dimana hubungan Islam dan negara mengarah pada konflik, perkembangan madrasah cenderung terbatas; bahkan mungkin terancam eksistensinya. Begitupun sebaliknya, dalam kondisi hubungan negara dan umat Islam bersifat integrative, kebijakan Orde Baru terhadap madrasah tampak sangat positif dengan menempatkan madrasah secara konsisten dalam sistem pendidikan nasional.⁴² Pola ini kadang menyebabkan masuknya pengaruh kekuasaan dan intrik politik ke dalam pendidikan pesantren pesantren dan ketika pesantren berusaha melepaskan diri dari ikatan kekuasaan, pemerintah cenderung untuk menghentikan dukungan yang diberikannya kepada pesantren.

³⁸ Haidar Putra Daulay, *Pertumbuhan Sejarah.....*, hal 110

³⁹ Maksum, *Madrasah: Sejarah dan*, hal. 161

⁴⁰ Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Suharto*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 213

⁴¹ Nurholish Madjid, *Islam dan Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 38

⁴² Maksum, *Madrasah: Sejarah dan*, hal. 133

Berdasarkan pada hal itu, Madrasah NW selalu responsif dan berusaha selalu dapat menyesuaikan diri dengan era di mana NW itu berada⁴³. Madrasah NWDI pernah mengalami masa-masa suram dalam relasinya dengan kekuasaan Orde Baru. Pada tahun 1982 misalnya, adanya penarikan sejumlah guru-guru negeri dari madrasah dan isu bahwa siswa yang belajar di madrasah NWDI akan mengalami kesulitan dalam pelajarannya. Hal ini menyebabkan menyusutnya jumlah siswa di madrasah. Hal ini tidak lepas dari aktivitas politik TGKH Zainuddin Abdul Majid pada pemilu 1982 yang tidak memberikan dukungan pada partai pemerintah. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya (1971 dan 1977) dukungan TGKH pada partai pemerintah menyebabkan madrasah ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah dengan adanya guru-guru negeri, masuknya tokoh-tokoh NW di legislative dan eksekutif serta masuknya bantuan keuangan ke madrasah-madrasah. Dengan kondisi 1982 yang tidak menguntungkan bagi madrasah itulah, pada pemilu berikutnya di tahun 1987 beliau memberikan kembali dukungannya pada partai pemerintah sampai wafatnya.

Ada beberapa alasan adopsi pendidikan umum dalam pendidikan madrasah di Madrasah Nahdlatul Wathan pada waktu itu, *pertama*, dunia kerja yang baik di pemerintahan maupun di swasta akan lebih mudah dimasuki dengan adanya kemampuan pengetahuan umum dan ijazah yang diakui pemerintah, sementara pesantren saat itu hanya menyelenggarakan pendidikan agama dan tidak menyediakan ilmu yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar kerja. Oleh karena itu, agar mesti ada pembaharuan pesantren dengan membuka diri terhadap perubahan yang ada agar tetap eksis. *Kedua*, tujuan memasukkan pendidikan umum ke pesantren adalah untuk mengangkat citra pondok pesantren agar tidak terkesan kolot, tidak teratur, tidak peduli kemajuan dan anti perubahan; *ketiga* munculnya faktor politis dengan adanya kebijakan pemerintah yang memberikan perhatian pada pesantren yang mengadopsi pendidikan umum dengan cara memberikan bantuan penyelenggaraan pendidikan. *Keempat*, mulai maraknya kegiatan belajar agama di sekolah-sekolah umum menyebabkan anak-anak tidak perlu lagi ke pesantren kalau hanya sekedar belajar agama. Dengan adanya pendidikan umum di pesantren yang menjamin masa depan kerja dan pendidikan lanjutan anak, maka minat orang tua untuk memasukkan anak ke pesantren akan muncul kembali karena keuntungan ganda yang diperoleh santri dalam belajar.⁴⁴

Fase ini disebut Maksud sebagai tahapan integrasi madrasah dalam sistem pendidikan Nasional dengan lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989.⁴⁵ Jika dalam Undang-Undang Pendidikan sebelumnya pendidikan nasional hanya bertumpu pada jalur pendidikan sekolah, maka pada USPN tahun 1989 pendidikan nasional mencakup jalur sekolah dan luar sekolah, serta meliputi jenis pendidikan akademis, pendidikan profesional, pendidikan kejuruan dan pendidikan keagamaan. Implikasi terhadap madrasah menyebabkan

⁴³ Fahrurrozi, "Islam Nusantara: Menemukanali, hal. 9

Fathurrahman, "Perkembangan Lembaga Pendidikan, hal. 78

⁴⁵ Maksud, *Madrasah: Sejarah dan*, hal.54

semua kurikulum, jenjang pendidikan, struktur di madrasah menjadi paralel dengan kurikulum, jenjang dan struktur sekolah umum. Dengan integrasi ini madrasah kemudian didefinisikan sebagai sekolah umum berciri khas Islam.⁴⁶

Implikasi dari definisi madrasah sebagai sekolah yang berciri khas Islam memerlukan beberapa penyesuaian dalam kurikulum madrasah dimana kemudian Departemen Agama melakukan program peningkatan kualitas madrasah di Indonesia melalui pembenahan kurikulum yang dikenal dengan kurikulum 1994 yang mewajibkan madrasah melaksanakan sepenuhnya kurikulum sekolah umum seperti yang berlaku di kementerian pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud). Di kurikulum 1994 ini madrasah wajib melaksanakan 100% kurikulum yang dibebankan pada sekolah-sekolah umum. Penghapusan ini nampaknya menghapus pengajaran agama, namun sesungguhnya memberikan peluang pembelajaran agama dalam bentuk lain yang terintegrasi dalam pelajaran umum⁴⁷

4. Madrasah Nahdlatul Wathan Pada Masa Reformasi

Menurut Sukamto, sisi lain dari dominasi kyai dalam pesantren adalah adanya pemusatan kekuasaan pada figur masing-masing anggota keluarga pesantren. Masing-masing figur mempunyai jawaban terhadap jenis permasalahan yang dihadapi lembaga, yang sebenarnya merupakan permasalahan kelembagaan. Namun nyatanya adanya pemetaan kedudukan dan fungsi yang dimiliki dalam struktur organisasi tidak berpengaruh dalam mekanisme kerja organisasi pesantren. Sehingga apabila terjadi salah satu anggota keluarga yang meninggal terjadi perebutan kekuasaan, yang berkisar pada topic siapa yang berhak mengganti kedudukan tersebut.⁴⁸

Hal ini juga dialami Madrasah NWDI pada era reformasi pasca meninggalnya TGKH Zainuddin Abdul Majid pada tanggal 21 Oktober 1997, muncul konflik di yayasan yang berimbas pada madrasah NWDI. Konflik ini berkisar pada klaim siapa yang lebih berhak mengelola madrasah yang merupakan madrasah induk bagi kalangan Nahdlatul Wathan. Dampak pada madrasah tersebut terlihat dari adanya perubahan-perubahan struktur pengelolaan madrasah, terjadinya pemindahan madrasah, perubahan dan perpindahan guru dan siswa madrasah.

Terlepas dari dampak negatif konflik di madrasah pada era reformasi, konflik tersebut pada sisi lain memberikan dampak positif bagi kalangan Nahdlatul Wathan dalam pengembangan pendidikan Islam, termasuk madrasah. Dengan dua pusat pendidikan yang berbeda namun berideologi satu, menyebabkan meluasnya pusat-pusat pendidikan madrasah baik yang berafiliasi pada pengurus Pancor, maupun yang berafiliasi pada pengurus Pancor. Dualisme ini memunculkan nilai kompetisi untuk masing-masing berjuang membangun sesuai dengan keahlian masing-masing.⁴⁹ Walaupun munculnya madrasah-madrasah yang berkembang pesat dengan tidak menampakkannya afiliasinya seperti pada madrasah di Nurul Haramain Narmada,

⁴⁶ Maksum, *Madrasah: Sejarah dan*, hal. 155

⁴⁷ Jajat Burhanudin, "Accelerating The Empowerment of Madrasah: The Policy of Islamic Education in Indonesia", dalam *Jurna Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, Volume 7 Number 2, 2000, hal. 192

⁴⁸ Sukamto, *Kepemimpinan Pesantren* hal. 216

⁴⁹ Fahrurrozi, "Islam Nusantara: Menemukanali", hal 10

Madrasah di pondok Pesanten Salut Narmada, Madrasah al-Aziziyah Kapek Gunung Sari.

Madrasah Nwdi Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat

Di era reformasi, sebagaimana madrasah lainnya, madrasah NWDI dan NBDI menghadapi beragam tantangan pasca modernisasi dan globalisasi secara. Dengan terjadinya perubahan kebijakan dan politik pendidikan, madrasah memiliki peluang sekaligus tantangan berkenaan dengan jenis pendidikan yang dapat dipilih dan diselenggarakan yang setidaknya-tidaknya menyediakan tiga atau empat pilihan. (1) Pendidikan madrasah yang berpusat pada *tafaqquh fi al-din* dengan kurikulum yang hamper sepenuhnya agama. (2) pendidikan madrasah yang mengikuti kurikulum Diknas dan Departemen Agama sebagaimana definisi madrasah sebagai sekolah umum bercirikan agama. Atau (3) madrasah meniru sekolah Islam plus yang mengikuti kurikulum Diknas dengan agama sebagai 'plus' atau unggulannya.

Madrasah Nahdlatul Wathan mampu merespon perkembangan ini dengan menghadirkan pilihan-pilihan tersebut melalui keberadaan MA/MTs Muallimin dan Muallimat, MA/MTS NW serta MA Keagamaan sebagai lembaga pendidikan yang diorientasikan pada *tafaqquh fi al-din* tanpa melepaskan pendidikan umum. Kemudian pendirian SMI, SMP/SMA/SMK NW sebagai sekolah yang berbasis pada pendidikan umum namun di dalamnya mengadopsi pendidikan keagamaan.

Pilihan ini untuk memenuhi harapan masyarakat pada madrasah Nahdlatul Wathan dalam dapat menjalankan tiga fungsi pokoknya. *Pertama*, transmisi ilmu-ilmu dan pengetahuan Islam (transmission of Islamic knowledge), *kedua*, pemeliharaan tradisi Islam (*maintenance of Islamic tradition*), *ketiga*, reproduksi (calon-calon) ulama (*reproduction of 'ulama*). Harapan *kedua*, agar para peserta didik tidak hanya mengetahui ilmu agama, tetapi juga ilmu umum atau sebaliknya tidak hanya menguasai pengetahuan umum, tetapi juga unggul dalam ilmu agama. *Ketiga*, agar anak didik memiliki keterampilan, keahlian dalam bidang sains dan teknologi yang menjadi karakter dan ciri masa globalisasi.⁵⁰ Terdapat beberapa aspek yang mendukung peran madrasah Nahdlatul Wathan sehingga mampu berkembang hingga sekarang ini. yaitu:

1. Dukungan masyarakat sebagai basis terbesar madrasah NW

Menurut Malik Fajar, kemunculan madrasah merupakan proses transformasi dari pendidikan pesantren sebagai *indigenous* pendidikan Islam Indonesia dengan corak pembelajaran mistiknya ke corak Islam Sunni dengan semakin dekatnya ke dalam jaringan Islam *haramain*, tempat sumber yang 'asli'.⁵¹ Meskipun terlibat dalam proses pembaharuan madrasah sebagai simbol gerakan modernisasi di Lombok sejak dulu. Pada aspek lainnya madrasah NW selalu adaptif dan menolerir terhadap tradisi-tradisi yang selama ini berkembang dalam masyarakat Lombok. Perlindungan dan penjagaan secara adaptif pada *local wisdom* yang disesuaikan dengan norma-norma agama yang kemudian dipraktekkan dalam kehidupan

⁵⁰ Azyumardi Azra, "Pendidikan Islam di Era Globalisasi" dalam Marwan Saridjo, *Mereka Bicara Pendidikan Islam: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Guppi dengan PT RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 20

⁵¹ A. Malik Fajar, *Madrasah*, hal. 23-24

beragama masyarakat muslim Sasak, memungkinkan madrasah NWDI diterima dan didukung secara luas dan terbuka oleh bagian besar masyarakat Lombok.⁵²

Arus perubahan zaman dan pola pikir modern yang berkembang dalam masyarakat pun tidak sampai menjauhkan masyarakat Lombok dari keterikatan emosional mereka terhadap lembaga pendidikan Nahdlatul Wathan. Diadopsinya sistem pendidikan umum dalam madrasah agar lulusannya mampu bersaing di pasar kerja dengan tanpa mengabaikan tradisi pesantren sebagai basis madrasah dengan pengkajian kitab-kitab kuning, pembinaan moral untuk selalu berbuat sopan santun, semangat mencari dan mengamalkan ilmu agama serta sikap sabar menghadapi persoalan duniawi, menyebabkan masyarakat Lombok merasa lebih nyaman dengan keuntungan ganda yang diperoleh jika memasukkan anaknya ke madrasah NW.

2. Keberadaan para Tuan Guru sebagai pemimpin madrasah

Bagi masyarakat NW, peran tuan guru sebagai ahli agama menempati posisi yang signifikan. Bahkan tidak hanya sekedar ‘pangkat’ yang berkonotasi agama semata, tetapi telah menjadi semacam *cultural broker*. Sejumlah penelitian etnografi dan sejarah Lombok mencatat tingkat kepatuhan masyarakat yang sangat tinggi terhadap tuan guru, sehingga kegiatan pembangunan haruslah disetujui tuan guru bila ingi segala sesuatunya berjalan dengan baik.⁵³

Madrasah NWDI telah menghasilkan lulusan-lulusan yang menjadi tuan guru dan mendirikan madrasah di tempatnya masing-masing. Keberadaan mereka di masyarakat berperan membentuk pandangan masyarakat terhadap kredibilitas madrasah NWDI, sehingga masyarakat tidak ragu-ragu terhadap pendidikan madrasah di NW. Kepercayaan yang sangat tinggi terhadap tuan guru dan pengayoman tuan guru terhadap masyarakat, menyebabkan masyarakat Lombok sangat responsif terhadap apa yang disampaikan oleh tuan guru.

3. Kemampuan inovasi madrasah dalam merespon perkembangan sosial keagamaan.⁵⁴

Terdapat slogan *al-muhafazhah ala al-qadim al-shalih wa al-akhzu bi al-jadid al-ashlah*, memelihara dan merajut tradisi-tradisi yang lama dengan tetap mengadopsi sesuatu yang kontemporer yang dianggap relevan. Statemen tersebut direalisasikan oleh madrasah NW dengan membuat sesuatu yang baru yang sesuai dengan karakter sosial masyarakat Lombok. Seperti (1) semangat beramal; melontar dengan uang yang memungkinkan semua masyarakat beramal tanpa merasa malu dengan nominal yang sedikit demi kepentingan umat yang lebih banyak. (2) semangat berdoa: *hizib* berjamaah, sebagai kekuatan spiritual khas dan otentik dalam tradisi Nahdlatul Wathan; (3) semangat berulang tahun: Hultah NWDI sebagai acara pengajian tahunan pendirinya dan media silaturahmi dan komunikasi antar alumni dan jamaah NW di seluruh Nusantara. Media ini merupakan upaya membangun kesadaran dan semangat bersama dalam memperingati nilai-nilai

⁵² Fathurrahman, “Perkembangan Lembaga Pendidikan hal. 146

⁵³ Jhon Ryan Bortolomew, *Alif Lam Miem: Kearifan Masyarakat Sasak*, terj. Imron Rosyidi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hal. 86

⁵⁴ Fahrurrozi, “Islam Nusantara: Menemukanali, hal. 16

perjuangan NWDI; (4) Tradisi *Syafa'ah al-Kubro*. Tradisi syafa'ah ini terus-menerus dikembangkan oleh warga NW. Disamping menganjurkan jama'ahnya untuk banyak berzikir secara berjama'ah juga sebagai ajang silaturahmi antar sesama muslim. Dalam skala besar tradisi syafa'ah dijadikan sebagai sarana untuk beramal jari'ah bagi kalangan masyarakat NW, khususnya masyarakat pesantrennya dan (5) semangat emansipatoris: pendidikan bagi kaum perempuan, yang kemudian mendorong terciptanya lembaga-lembaga keperempuanan di Lombok. Hal ini jelas memberikan nuansa baru dalam aspek pembangunan sosial keagamaan di tengah komunitas Sasak.

PENUTUP

Sejarah berdirinya madrasah di masa klasik maupun di Indonesia dapat dikatakan sebagai bentuk responsibilitas masyarakat muslim terhadap perkembangan zaman untuk memformat pendidikan terbaik pada masanya. Pendirian madrasah pada masa klasik merupakan transformasi dari pendidikan masjid ke pendidikan madrasah sebagai akibat dari semakin semaraknya aktivitas pendidikan. Di Indonesia, pendirian madrasah merupakan respon masyarakat muslim terhadap pembaharuan Islam dan kebijakan pendidikan masa lolonial yang diskriminatif dan menjauhkan masyarakat Indonesia dari pendidikan keagamaan sehingga melahirkan bentuk kelembagaan yang mengadopsi sistem pendidikan modern dalam sistem pendidikan Islam yang berbentuk madrasah. Madrasah Nahdlatul Wathan merupakan madrasah terbesar di Nusa Tenggara Barat yang berkembang dari sistem pesantren ke lembaga madrasah untuk merespon fenomena tersebut. Madrasah ini terus berkembang dari awal hingga sekarang dengan kemampuan menyesuaikan diri dalam perubahan zaman yang didukung oleh berbagai hal seperti dukungan masyarakat sebagai basis madrasah, keberadaan para tuan guru sebagai pemimpin madrasah dan pesantren, kemampuan melakukan inovasi dalam merespon perkembangan sosial keagamaan dalam masyarakat Lombok.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik *et.al.*, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Akar dan Awal* jilid 1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: 2002)
- Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Suharto*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Anwar, M. Syafi'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995)
- Aziz, Jamaluddin Abdul, "Hamzanwadi dan NW" Disertasi, Universitas Kebangsaan Malaysia, Program Diploma F.P.I UKM, 1989)
- Bortolomew, Jhon Ryan, Alif Lam Miem: *Kearifan Masyarakat Sasak*, terjm. Imron Rosyidi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001)
- Burhanudin, Jajat "Accelerating The Empowerment of Madrasah: The Policy of Islamic Education in Indonesia", dalam *Jurnal Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, Volume 7 Number 2, 2000
- Daulay, Haidar Putra, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Pendidikan Daerah Nusa Tenggara Barat, (Jakarta: Depdikbud, 1984)
- Drajat, Manpan, 'Sejarah Madrasah di Indonesia' dalam jurnal al-Afkar: Journal for Islamic Studies, Vol. 1 No. 1 Januari 2018
- Fahrurrozi, "Islam Nusantara: Menemukan Peran Organisasi Nahdlatul Wathan Terhadap Pembangunan Sosial Keagamaan di Indonesia". Makalah Annual Conprence On Islamic Studies,
- Fajar, A. Malik, Madrasah dan Tantangan Modernitas, (Bandung: Mizan, 1998)
- Fathurrahman, "Perkembangan Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Darunnahdlatul Wathan Pancor Lombok 1937-2002" Tesis pada Program Pascasarjana IAIN Yogyakarta tahun 2002
- Hamzanwadi 80 Tahun dan Pengabdianannya Terhadap Agama Nusa dan Bangsa, (Pancor: Yayasan Pendidikan Hamzanwadi, 1985)
- Machali, Imam dan Ara Hidayat, The Handbook of Education Management: Teori dan Praktek Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Madjid, Nurcholish, Islam dan Kemodernan dan Keindonesiaan, (Bandung: Mizan, 1999)
- Maksum, Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Miftahuddin, Sejarah Perkembangan Intelektual Islam di Indonesia: Dari Abad XIX Sampai Masa Kontemporer, (Yogyakarta: UNY Press, 2017)
- Murodi, "Perkembangan Institusi Pendidikan Islam di Hindia Belanda" dalam Jurnal Madrasah No. 03 PPIM, Jakarta, 1997..
- Noer, Deliar, Administrasi Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1983)
- Nu'man, Abdul Hayyi & Shafari Asy'ari, Nahdlatul Wathan: Organisasi Pendidikan, Sosial dan Dakwah Islamiyah, (Lombok Timur: Pengurus Daerah Nahdlatul Wathan Lombok timur, tt),
- Saridjo, Marwan, Mereka Bicara Pendidikan Islam: Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta: Guppi dengan PT RajaGrafindo Persada, 2009)
- Stanton, Charles Michael, Pendidikan Tinggi Dalam Islam, terjm. H. Afandi dan Hasan Asari, (Jakarta: Logos Publishing House, 1994)
- Steenbrink, Karel A., Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern, (Jakarta: LP3ES, 1994)
- Syamsuddin, "Peranan Nahdlatul Wathan Dalam Pengembangan Dakwah Islam di Lombok Melalui Pendekatan Pendidikan" Skripsi, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1982,
- Yusuf, M., Sejarah Ringkas Perguruan Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah dan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah NW, (Pancor Selong, ttp, 1976)